

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP BIAYA PEMELIHARAAN ANAK SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 173/Pdt.G/2017/PA.Yk)

Oleh : Ferti Amalia Mauli*

INTISARI

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun demikian kekekalan dan kebahagiaan yang diinginkan kadang kala tidak berlangsung lama dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perceraian yang berakibat terhadap tiga hal, yaitu putusnya ikatan suami isteri, harus dibaginya harta perkawinan yang termasuk harta bersama, dan ketiga pemeliharaan anak yang harus diserahkan kepada salah seorang dari ayah atau ibu.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian dokumen atau kepustakaan dengan mencari teori-teori, pandangan yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dan untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian dokumen dan kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan, yaitu dari narasumber.

Dalam hal terjadi sengketa pemeliharaan anak Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara No.173/Pdt.G/2013/PA.Yk mengambil sikap dengan mempertimbangkan mampu atau tidaknya seorang ayah dalam memberikan biaya pemeliharaan terhadap anaknya. Kemudian langkah yang diambil Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap putusan No.173/Pdt.G/2017/PA.Yk, hanya sebatas pengawasan dengan jangka waktu sampai diucapkannya ikrar talak oleh suami. Apabila sampai jangka waktu tersebut tidak ada upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, maka Pengadilan menganggap bahwa putusan tersebut tidak bermasalah dan dapat dilaksanakan oleh para pihak. Dengan tidak terpenuhinya putusan Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap perkara No.173/Pdt.G/2017/PA.Yk mewajibkan ayah untuk membiayai pemeliharaan anak, maka ibu untuk dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, yang dapat dilakukan dengan cara paksa.

Kata kunci: Perkawinan, Perceraian, dan Pemeliharaan Anak

* Mahasiswa pada Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

**JURIDICAL REVIEW OF RELIGIOUS COURT DECISION
ENFORCEMENT CONCERNING FATHER
RESPONSIBILITY IN COSTS OF
LIVING AFTER DIVORCE
(Case Study of Decision Number 173/Pdt.G/2017/PA.Yk)**

By: Ferti Amalia Mauli[†]

ABSTRACT

According to the Article 1 of Law number 1 1974, the aim of marriage was to establish a happy and eternal blessed family based on supreme deity. Nevertheless, not all marriage will attain a good destination. The wanted eternity and happiness sometime cannot hold longer, which is means that marriage was not ended with happiness and there also any probability divorce occurred that is resulted three things, namely: the termination husband-wife relationship, their property-wealth must be divided include join wealth, and their children nursing right that must be delivered toward one of them, either father or mother.

This research used normative juridical approach method with study specification analytical descriptively. This research focused on documents or literature research by searching theories or opinions that have correlation and relevant with studied issues. But, for complete any gained data previously from document and literature researches, then field research was conducted, namely interviewing the resource points (informants).

In case of any dispute over child nursing/ maintenance, court judges took the attitude that is by considering whether or not a father may provide maintenance costs for their children. Further, step that is taken by Yogyakarta Religion Court on verdict No.173/Pdt.G/2017/PA.Yk, observational limited only during period until the husband stated divorce (talak). If until that time, there were no efforts at all done by the parties who feel damage his or her interest, then Court considered that such verdict was no problems and may be done by all parties. By the unmet the Yogyakarta Religion Court's verdict No. 173/Pdt.G/2017/PA.Yk, which is required father to defray his children maintenance, then mother may submit execution request toward Chief of Yogyakarta Religion Court, that may be applied by compulsion.

Keywords: Marriage, Divorce, and Children Maintenance

[†] Student of Civil Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta